

Pariwisata khususnya di wilayah Bali yang sebagian besar industrinya berasal dari jasa pariwisata, memiliki peran yang besar dalam pengendalian penggunaan energi menuju ke arah yang lebih efisien. Saat ini pengembangan moda transportasi sepeda di destinasi pariwisata Sanur sangat diperhatikan, banyaknya elemen pemerintah, swasta dan masyarakat yang terlibat dalam implementasi pengembangan jalur sepeda ini menyebabkan kendala tersendiri dari aspek institusional yang mengakibatkan fungsi jalur sepeda menjadi kurang optimal. Dapat dilihat banyak permasalahan seperti konflik ruang antar pesepeda dan non pengguna sepeda. Melihat adanya potensi kendala dalam pengelolaan jalur sepeda di kawasan pariwisata sanur yang telah diuraikan di atas, maka sangat dibutuhkan adanya kajian yang lebih mendalam tentang pengelolaan kawasan pariwisata sepeda melalui peran dan koordinasi antar *stakeholder* yang terlibat. Penelitian ini menggunakan metode deduktif kualitatif dengan metode pengumpulan data sekunder dan primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap narasumber. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang lokasi dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan *stakeholders* terkait dengan pengembangan jalur sepeda. Data penunjang diperoleh dari instansi terkait melalui penelusuran dokumen, studi pustaka, laporan dan kebijakan. Analisis *stakeholders* dilakukan dengan matriks kepentingan dan pengaruh *stakeholders* terhadap pengembangan jalur sepeda wisata yang menggunakan *stakeholders grid* dengan bantuan Microsoft Exel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya *stakeholders* sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya, namun program pengembangan jalur sepeda yang dibuat belum sepenuhnya sinkron dengan *stakeholders* lainnya karena pengembangan jalur sepeda direncanakan secara *bottom up* dari LSM, komunitas, masyarakat dan aktivis. Hal ini ditunjukkan dengan masih belum adanya kegiatan dan dukungan dana dari beberapa *stakeholders*. Sedangkan dari aspek koordinasi antar *stakeholders* dilakukan secara internal dan eksternal. Mekanisme koordinasi sudah dilakukan secara dinamis, namun masih memiliki beberapa kendala, yaitu masih adanya mindset egosektoral dari sebagian *stakeholders*; keterbatasan anggaran dana; dan landasan hukum yang masih belum kuat untuk menjadi pedoman teknis dalam mengatur perencanaan anggaran, dalam hal ini renstra dan masterplan pengembangan jalur sepeda kawasan pariwisata Sanur yang masih perlu disempurnakan.

Kata kunci : wisata sepeda, *stakeholders*, peran, koordinasi, Sanur

ABSTRACT

Tourism, especially in the Bali region where most of the industry comes from tourism services, has a large role in controlling the use of energy towards a more efficient direction. At present the development of bicycle transportation modes in Sanur tourism destinations is of high concern, as many government, private and community elements are involved in the implementation of the development of bicycle lanes causing its own institutional constraints that result in the function of the bicycle lane being less than optimal. Can be seen many problems such as space conflicts between cyclists and non bicycle users. Seeing the potential obstacles in managing bicycle lanes in the Sanur tourism area described above, it is very necessary to have a more in-depth study of the management of bicycle tourism areas through the role and coordination between the stakeholders involved. This study uses a qualitative deductive method with secondary and primary data collection methods obtained through in-depth interviews (interviews) of the sources. Observations were made to get a picture of the location and activities carried out by stakeholders related to the development of the bicycle lane. Supporting data was obtained from relevant agencies through document searches, literature studies, reports and policies. Stakeholder analysis is carried out with a matrix of stakeholder interests and influences on the development of a bicycle tour path using stakeholder grids with the help of Microsoft Exel.

The results showed that in general stakeholders had a role in accordance with their duties and functions, but the bicycle track development program that was made was not yet fully in sync with other stakeholders because the development of the bicycle path was planned bottom up from NGOs, communities, communities and activists. This is indicated by the lack of activities and financial support from several stakeholders. While the aspect of coordination between stakeholders is done internally and externally. The coordination mechanism has been carried out dynamically, but it still has several obstacles, namely the existence of an egosectoral mindset of some stakeholders; budget constraints; and the legal basis that is still not strong enough to become a technical guideline in regulating budget planning, in this case the strategic plan and master plan for the development of the Sanur tourism area bicycle path that still needs to be improved.

Keywords: *bicycle tour, stakeholders, roles, coordination, Sanur*